

# KETERWAKILAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PARTAI ACEH PADA PEMILU 2019 DI KOTA BANDA ACEH

Fikri Fathani

NPP.32.0012

Asal Pendaftaran Provinsi Aceh

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Pembimbing Skripsi: Bapak Dr. Andi Azikin, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement / Background (GAP):** Terjadi penurunan representasi anggota Partai Aceh di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya kursi Partai Aceh, bagaimana persepsi dan respon masyarakat terhadap penurunan tersebut, serta bagaimana strategi yang diadopsi Partai Aceh untuk meningkatkan perolehan suara dan representasi legislatif di DPRD Banda Aceh. **Purpose:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor penyebab penurunan representasi anggota Partai Aceh di DPRD Banda Aceh, mengidentifikasi persepsi dan respon publik terkait penurunan tersebut, serta menganalisis strategi yang diterapkan Partai Aceh dalam meningkatkan suara dan kursi legislatif. **Method:** Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan panduan teori representasi Pitkin (1967) yang terdiri dari empat dimensi: wakil (representative), yang diwakili (represented), substansi representasi (substance of representation), dan konteks politik (political context). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah Sekretaris Jenderal DPW Partai Aceh Banda Aceh, anggota legislatif dari fraksi Partai Aceh, serta perwakilan komunitas agama, adat, dan pemuda di Banda Aceh. **Result:** Penurunan kursi Partai Aceh di DPRD Banda Aceh pada Pemilu 2019 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tidak semua calon legislatif memiliki kompetensi yang merata, sikap individuistik, dan komitmen kerja yang menurun. Faktor eksternal melibatkan kritik dari komunitas adat yang melihat kurangnya komitmen konsisten partai dan persepsi negatif pemuda terhadap kualitas personal anggota partai. Hanya sembilan kader teratas yang berhasil duduk sebagai anggota legislatif. Penurunan kepercayaan publik dan kinerja legislatif yang kurang optimal turut memperburuk situasi. **Conclusion:** Partai Aceh memandang penurunan kursi sebagai hal yang biasa secara internal, namun menanggapi kritik dari komunitas luar. Untuk mengatasi penurunan tersebut, DPW Partai Aceh melakukan strategi seperti penguatan konsolidasi basis pemilih, merekrut calon legislatif yang lebih kompeten, kampanye rutin melalui media sosial, dan memperkuat persatuan partai melalui pendekatan politik akar rumput.

**Keywords:** representasi, Partai Aceh, penurunan representasi, DPRD Banda Aceh, strategi politik

## ABSTRAK

**Permasalahan / Latar Belakang (GAP):** Terjadi penurunan keterwakilan anggota DPRD dari Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019. Penurunan ini menimbulkan pertanyaan tentang penyebabnya, bagaimana pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap penurunan tersebut, serta

strategi apa yang digunakan Partai Aceh untuk meningkatkan suara dan kursi legislatif. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan mengkaji penyebab menurunnya keterwakilan anggota DPRD Partai Aceh di Banda Aceh, mengidentifikasi pandangan dan tanggapan masyarakat, serta menganalisis strategi yang digunakan partai untuk meningkatkan perolehan suara dan kursi di DPRD. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan teori keterwakilan Pitkin (1967), yang meliputi empat dimensi: wakil, yang diwakili, substansi keterwakilan, dan konteks politik. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Sekretaris Jenderal DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh, anggota legislatif dari fraksi Partai Aceh, dan perwakilan komunitas agama, adat, serta pemuda. **Hasil / Temuan:** Penurunan kursi Partai Aceh di DPRD Kota Banda Aceh dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Walau sebagian besar anggota dewan berkualitas, tidak semua calon legislatif memiliki kompetensi setara sehingga hanya sembilan kader terbaik yang terpilih. Rendahnya kinerja legislatif, menurunnya kepercayaan publik, dan lemahnya fungsi legislasi memperparah kondisi. Faktor internal seperti inkonsistensi dan ego sektoral juga signifikan. Internal partai cenderung menganggap penurunan sebagai hal wajar. Dari sisi eksternal, komunitas adat mengkritik kurangnya komitmen partai, sedangkan komunitas pemuda menyalahkan karakter individu anggota partai. **Kesimpulan:** DPW Partai Aceh mengambil strategi memperkuat pendekatan politik akar rumput, membangun soliditas internal, mengkonsolidasikan basis pemilih, merekrut calon legislatif berkualitas, serta rutin melakukan kampanye melalui media sosial dan metode lainnya untuk mengatasi penurunan keterwakilan.

**Kata kunci:** keterwakilan, Partai Aceh, penurunan representasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara yang menganut sistem demokrasi ditandai oleh partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui jalur formal maupun non-formal. Salah satu indikatornya adalah keberadaan wadah yang memungkinkan masyarakat berkumpul dan menyalurkan ide serta aspirasinya untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu partai politik. Partai politik berfungsi sebagai wadah masyarakat dengan asas, tujuan, dan visi-misi yang sejalan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran penting dalam proses demokrasi (Budiardjo, 2003). Politik dan pemerintahan Indonesia menerapkan asas desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pemerintahan sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing. Pendekatan ini penting mengingat Indonesia adalah negara heterogen yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan karakteristik lain yang memerlukan pengelolaan khusus di tingkat daerah.

Aceh adalah wilayah dengan karakteristik khas, yakni budaya syariat Islam dan adat lokal yang kuat. Aspirasi masyarakat Aceh untuk menjadikan syariat Islam sebagai hukum formal merupakan perjuangan panjang (Bakar, 2020). Konflik disintegrasi Aceh dengan pemerintah pusat, dari Gerakan DI/TII hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tidak hanya berakar pada ideologi, tetapi juga ketidakpuasan atas sentralisasi kekuasaan, ketimpangan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakadilan. Konflik ini diselesaikan melalui perundingan yang menghasilkan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 (Bakar, 2020). MoU tersebut memberikan kewenangan bagi Aceh untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dengan desentralisasi asimetris, termasuk di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Salah satu kewenangan politik penting adalah pendirian partai politik lokal, sebagaimana tercantum dalam butir 1.2.1 MoU Helsinki:

Isi Poin 1.2.1 MoU Helsinki :

*Sesegera mungkin, tidak lebih dari satu tahun setelah penandatanganan MoU, Pemerintah RI menyetujui dan memfasilitasi pembentukan partai politik berbasis Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Dalam tempo satu tahun, paling lambat 18 bulan, Pemerintah RI akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan tepat waktu Nota Kesepahaman ini akan memberikan kontribusi positif bagi maksud tersebut.*

Sumber: [ppid.acehprov.go.id](http://ppid.acehprov.go.id) (2024)

Sebagai tindak lanjut MoU Helsinki, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan untuk membentuk partai politik lokal (Bab XI Pasal 75). Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2007 memperkuat legitimasi ini. Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara hukum diizinkan memiliki partai politik lokal yang berpartisipasi dalam proses politik di wilayahnya. Warga Aceh dapat mendirikan partai politik lokal untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan di tingkat pemerintahan Aceh, baik di DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi, maupun jabatan eksekutif seperti Bupati/Wali Kota dan Gubernur (PP No. 20 Tahun 2007). Karena lingkungannya terbatas di Aceh, partai lokal ini tidak memiliki kepengurusan nasional dan tidak berpartisipasi dalam pemilihan politik pusat.

Partai politik lokal di Aceh berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat melalui jalur politik, menyusun kebijakan yang sejalan dengan syariat Islam, dan memperkuat identitas serta budaya daerah. Selain itu, mereka berperan dalam mewujudkan keadilan, memperkuat ekonomi, dan meningkatkan kemandirian pengelolaan sumber daya alam. Keberadaan partai lokal memungkinkan penyaluran aspirasi secara konstitusional, yang dapat meredam konflik, mencegah kekerasan, dan melindungi hak asasi manusia. Semangat perdamaian melalui partai lokal diharapkan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Partai Aceh adalah partai lokal terbesar berdasarkan perolehan suara dan keterwakilan legislatif maupun eksekutif. Pada Pemilu 2019, menurut Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh, partai ini memperoleh 21% suara sah dan 18 dari 81 kursi di parlemen Aceh. Di tingkat Kabupaten/Kota, Partai Aceh meraih 118 kursi di 23 kabupaten/kota, seperti terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Peraihan Kursi Partai Aceh di Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh Tahun 2019**

| NO. | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH KURSI PARTAI ACEH | TOTAL KURSI | PERSENTASE |
|-----|----------------|--------------------------|-------------|------------|
| 1.  | Aceh Timur     | 16                       | 40          | 37,72%     |
| 2.  | Aceh Utara     | 14                       | 45          | 30,14%     |
| 3.  | Sabang         | 11                       | 20          | 51,32%     |
| 4.  | Pidie          | 9                        | 40          | 19,91%     |
| 5.  | Bireuen        | 9                        | 40          | 19,86%     |
| 6.  | Pidie Jaya     | 8                        | 25          | 28,38%     |
| 7.  | Aceh Jaya      | 7                        | 20          | 33,73%     |
| 8.  | Lhokseumawe    | 7                        | 25          | 24,10%     |
| 9.  | Aceh Barat     | 6                        | 25          | 21,86%     |
| 10. | Langsa         | 5                        | 25          | 20,56%     |

|     |                 |   |    |        |
|-----|-----------------|---|----|--------|
| 11. | Aceh Besar      | 5 | 35 | 14,96% |
| 12. | Aceh Tamiang    | 4 | 30 | 12,65% |
| 13. | Aceh Barat Daya | 3 | 25 | 11,04% |
| 14. | Aceh Selatan    | 3 | 30 | 10,75% |
| 15. | Nagan Raya      | 3 | 25 | 10,68% |
| 16. | Subulussalam    | 2 | 20 | 8,57%  |
| 17. | Banda Aceh      | 2 | 30 | 7,27%  |
| 18. | Gayo Lues       | 2 | 20 | 6,74%  |
| 19. | Bener Meriah    | 1 | 25 | 6,49%  |
| 20. | Aceh Tenggara   | 1 | 30 | 4,16%  |
| 21. | Aceh Tengah     | 1 | 30 | 3,40%  |
| 22. | Aceh Singkil    | 1 | 25 | 2,49%  |
| 23. | Simeulue        | 0 | 20 | 0%     |

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Aceh 2025

Dari total kursi DPRK se-Aceh, Partai Aceh meraih sekitar 18% dari 650 kursi, menunjukkan respon positif dan dukungan masyarakat pada Pemilu 2019. Hal ini memperlihatkan kekuatan signifikan partai tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sekaligus menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap Partai Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di legislatif. Fenomena ini bersifat jangka panjang dan tidak hanya situasional. Perbandingan hasil Pemilu dari 2009 hingga 2024 menunjukkan pola fluktuasi yang menarik. Secara umum, terdapat penurunan signifikan jumlah kursi Partai Aceh di parlemen Aceh dan DPRK Banda Aceh, mencerminkan tantangan elektoral yang dihadapi. Tabel berikut merangkum tren penurunan kursi tersebut.

**Tabel 2. Tren Penurunan Jumlah Kursi Partai Aceh dalam Pemilu (2009–2024)**

| Tahun Pemilu | Parlemen Aceh (DPRA) | Jumlah Kursi Partai Aceh |
|--------------|----------------------|--------------------------|
| 2009         | 33                   | 13                       |
| 2014         | 29                   | 6                        |
| 2019         | 18                   | 2                        |
| 2024         | 11                   | 0                        |

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh 2025

Penurunan signifikan terjadi di tingkat parlemen Aceh dari 33 kursi (2009) menjadi 11 kursi (2024). Di DPRK Banda Aceh, penurunan lebih drastis, di mana pada Pemilu 2024 Partai Aceh gagal memperoleh kursi sama sekali setelah tiga periode sebelumnya masih meraih kursi walaupun menurun. Hal ini menandakan pergeseran politik di kalangan pemilih Banda Aceh, yang kini lebih mendukung partai nasional seperti PKS, PAN, NasDem, dan Demokrat (Modusaceh.co, 2024).

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian mengenai keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Aceh pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh ini muncul dari fenomena nyata berupa penurunan signifikan jumlah kursi yang diperoleh Partai Aceh di DPRD Kota Banda Aceh. Meskipun pada Pemilu sebelumnya Partai Aceh masih berhasil memperoleh kursi, tren penurunan ini sangat mencolok, hingga pada Pemilu 2019 partai tersebut tidak mendapatkan satupun kursi di DPRK Kota Banda Aceh. Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan dinamika politik yang belum sepenuhnya dipahami secara mendalam, baik dari sisi faktor internal partai maupun faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi dan pilihan pemilih. Penelitian terdahulu umumnya lebih fokus pada penurunan kursi di tingkat provinsi atau aspek-aspek makro dari politik lokal, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik fenomena penurunan keterwakilan di tingkat kota, khususnya di Kota Banda Aceh yang merupakan basis politik penting bagi Partai Aceh. Selain itu, berbagai studi sebelumnya cenderung membahas faktor-faktor yang lebih umum seperti strategi pemasaran politik, ketidakpuasan pemilih, atau kompetisi antar partai, tanpa mengkaji secara rinci aspek kualitas kader, konsistensi partai, dan peran budaya politik lokal yang sangat khas di Aceh.

Kesenjangan lainnya terletak pada minimnya kajian yang mengintegrasikan teori keterwakilan Pitkin (1967) dengan kondisi politik lokal Aceh pasca-MoU Helsinki yang memberikan ruang bagi partai lokal seperti Partai Aceh untuk berperan secara konstitusional. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif empat dimensi keterwakilan: wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menggali faktor internal seperti kualitas kader, komitmen kerja, serta inkonsistensi internal partai yang berkontribusi pada penurunan kursi, sekaligus menelaah persepsi masyarakat dan kelompok-kelompok lokal seperti komunitas adat dan pemuda yang selama ini menjadi konstituen penting. Di sisi lain, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi strategi adaptif yang sedang dan akan dilakukan Partai Aceh untuk merespons tantangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam literatur politik lokal Aceh sekaligus menawarkan rekomendasi strategis yang praktis bagi penguatan kembali representasi politik Partai Aceh di masa depan, sekaligus mengisi kekurangan kajian sebelumnya yang kurang mempertimbangkan konteks politik unik Aceh dan perubahan tren pemilih di tingkat kota.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam studi ini berfokus pada dinamika keterwakilan politik dan penurunan jumlah kursi partai lokal, khususnya Partai Aceh, dalam pemilu legislatif di berbagai wilayah Aceh. Penelitian tentang eksistensi Partai Politik Lokal Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Ulfa (2024) mengungkapkan bahwa penurunan perolehan kursi parlemen Partai Aceh di daerah tersebut pada pemilu 2014 dan 2019 disebabkan oleh perubahan preferensi pemilih, ketidakpuasan terhadap kebijakan partai, dan meningkatnya kompetisi dari partai lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menitikberatkan pada faktor penyebab penurunan signifikan jumlah anggota DPRD dari Partai Aceh. Meskipun fokusnya berbeda pada wilayah penelitian, kajian ini menunjukkan adanya tren penurunan yang juga dialami Partai Aceh di daerah lain, termasuk Kota Banda Aceh. Hafijal (2020) melakukan analisis penurunan perolehan kursi Partai Aceh di Kabupaten Aceh Barat Daya pada pemilu legislatif 2019. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi calon legislatif partai tersebut, seperti kompetisi politik

yang ketat dan dinamika internal partai. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menguraikan faktor-faktor penyebab berkurangnya jumlah kursi, yang menunjukkan bahwa faktor internal organisasi dan kemampuan kader menjadi sangat menentukan dalam keberhasilan elektoral. Hasilnya memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kursi Partai Aceh, yang juga relevan dengan konteks Kota Banda Aceh

Nur, Usman, dan Safwadi (2018) meneliti dinamika politik partai lokal dan nasional pada pemilukada di Aceh tahun 2017 dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menyoroti alasan di balik perubahan elektabilitas partai lokal, termasuk Partai Aceh, serta dampak kekalahan calon kepala daerah yang diusung oleh partai tersebut. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika politik yang kompleks antara partai lokal dan nasional berdampak langsung pada elektoral dan posisi politik partai lokal, termasuk berkurangnya keterwakilan politik. Penelitian ini relevan karena menyoroti aspek strategi dan kondisi politik yang mempengaruhi hasil pemilu di Aceh Studi tentang penurunan suara Partai Demokrat pada pemilu legislatif 2014 di Kota Banda Aceh mengungkap beberapa faktor penyebab kekalahan, termasuk munculnya pesaing baru, perubahan preferensi pemilih, dan faktor internal partai. Penelitian ini memiliki kemiripan dalam membahas penyebab penurunan kursi partai politik lokal di Banda Aceh, walaupun fokusnya pada Partai Demokrat. Temuan ini mendukung argumen bahwa perubahan preferensi pemilih dan dinamika politik lokal berperan penting dalam penurunan keterwakilan partai politik di daerah tersebut

Kajian hukum terkait keberadaan partai politik lokal di Aceh berdasarkan Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2008 memberikan landasan regulasi yang mengakui dan mengatur partai politik lokal di Aceh sebagai instrumen penting dalam sistem politik Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan partai lokal seperti Partai Aceh memiliki tujuan khusus untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh secara konstitusional, mendukung demokrasi, dan memperkuat identitas lokal. Penelitian ini relevan untuk memahami kerangka hukum dan politik yang membentuk eksistensi serta tantangan yang dihadapi Partai Aceh dalam konteks representasi politik di tingkat daerah. Kelima penelitian tersebut secara kolektif memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab penurunan kursi Partai Aceh di DPRD, baik dari segi internal organisasi, dinamika politik lokal dan nasional, serta regulasi yang mengatur keberadaan partai politik lokal. Selain itu, faktor perubahan preferensi pemilih, kompetisi politik yang semakin ketat, serta penurunan kepercayaan publik menjadi poin penting yang konsisten ditemukan dalam berbagai kajian tersebut, yang semuanya berkontribusi untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena penurunan keterwakilan Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dalam konteks kajian politik lokal, khususnya dinamika keterwakilan partai politik lokal di Aceh, yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam pada periode Pemilu 2019. Kebaruan utama terletak pada fokus penelitian terhadap fenomena penurunan drastis keterwakilan Partai Aceh di DPRD Kota Banda Aceh yang merupakan daerah dengan karakteristik politik, sosial, dan budaya yang unik akibat otonomi khusus dan implementasi syariat Islam. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor internal seperti inkonsistensi organisasi, kaderisasi yang belum optimal, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja anggota legislatif, tetapi juga menganalisis faktor eksternal seperti perubahan preferensi pemilih yang semakin mengarah ke partai nasional, serta kritik dari komunitas adat dan pemuda. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori keterwakilan Pitkin (1967) yang

komprehensif mencakup dimensi wakil, yang diwakili, substansi perwakilan, dan konteks politik, penelitian ini memperlihatkan bagaimana interaksi antara faktor struktural, kultural, dan politik secara simultan mempengaruhi representasi politik lokal. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada pengungkapan strategi adaptif yang diterapkan Partai Aceh untuk mengatasi penurunan suara dan kursi, termasuk penguatan basis akar rumput, konsolidasi internal, dan pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye, yang sebelumnya jarang dikaji secara sistematis dalam konteks partai lokal Aceh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis baru dalam pengembangan studi politik lokal dan praktik demokrasi di wilayah otonomi khusus, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis praktis yang relevan bagi penguatan kualitas kader dan representasi politik partai lokal di tengah tantangan perubahan politik nasional dan regional.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena penurunan keterwakilan anggota legislatif dari Partai Aceh dalam Pemilu Tahun 2019 di Kota Banda Aceh. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi penyebab utama penurunan keterwakilan anggota DPRD dari Partai Aceh, menganalisis faktor-faktor internal (seperti organisasi partai, kaderisasi, kampanye) dan eksternal (seperti persepsi publik, kompetitor politik, regulasi) yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut, serta menyusun rekomendasi strategis bagi Partai Aceh untuk memperkuat kembali basis dukungan dan keterwakilan politiknya di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika politik lokal serta kontribusi praktis untuk pengembangan strategi politik Partai Aceh ke depan.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial-politik terkait penurunan keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019. Pendekatan kualitatif dipilih karena sangat sesuai untuk menggali informasi secara detail dan komprehensif mengenai persepsi, sikap, dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks kehidupan nyata, tanpa manipulasi variabel. Hal ini sesuai dengan penjelasan Arikunto (2017) bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang terjadi secara natural dengan cara mendalam, melalui interaksi langsung dengan para pelaku di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder (Suseno, 2013). Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang memiliki peran penting dan relevan dengan masalah penelitian. Informan kunci yang dipilih secara purposive meliputi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kota Banda Aceh, anggota legislatif dari fraksi Partai Aceh, serta tokoh masyarakat dari komunitas agama, adat, dan pemuda yang aktif di Kota Banda Aceh. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan peran dan pengetahuan mereka yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid dan mendalam. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi berupa arsip resmi partai, hasil pemilu, publikasi, dan laporan-laporan yang terkait dengan dinamika politik dan keterwakilan legislatif Partai Aceh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Menurut Simangunsong (2017:215), teknik wawancara melibatkan beberapa langkah penting, antara lain menyusun pedoman wawancara, menyiapkan perlengkapan yang diperlukan, serta menentukan jadwal pelaksanaan wawancara. Wawancara adalah teknik yang dilakukan melalui tatap muka dan sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber (Rubin & Rubin, 2012). Teknik ini memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan terbuka sekaligus memberikan keleluasaan bagi responden untuk menyampaikan jawaban secara lengkap dan kontekstual. Arikunto (2017) menekankan pentingnya wawancara sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif karena dapat menggali makna dan pengalaman subjek secara langsung. Observasi dilakukan secara partisipatif dan non-partisipatif untuk mengamati perilaku dan interaksi yang terjadi di lingkungan partai dan masyarakat. Dokumentasi meliputi pengumpulan berbagai dokumen resmi seperti berita acara, peraturan perundang-undangan, dan rekaman kegiatan kampanye serta rapat internal partai sebagai data pendukung. Setelah data dikumpulkan, proses analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2017) yang terdiri atas tiga tahap utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yang berfungsi untuk menyederhanakan, memfokuskan, dan memilih data yang dianggap relevan serta signifikan bagi permasalahan penelitian. Pada tahap ini, data mentah yang bersifat luas dan kompleks dipilah sehingga lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Tahap kedua adalah penyajian data, berupa pengorganisasian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik yang memberikan gambaran jelas mengenai hasil temuan di lapangan. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti melakukan refleksi terhadap data yang telah diproses untuk menemukan pola, tema, serta makna yang muncul, sekaligus melakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan temuan.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yaitu penggunaan beberapa sumber data, metode pengumpulan data, dan sudut pandang informan yang berbeda-beda. Triangulasi bertujuan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, sebagaimana diuraikan Arikunto (2017) bahwa triangulasi merupakan strategi penting dalam penelitian kualitatif guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang hasil wawancara dengan para informan untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Lokasi penelitian dipilih di Kota Banda Aceh karena merupakan wilayah pusat dinamika politik Partai Aceh serta lokasi berlangsungnya Pemilu 2019 yang menjadi fokus kajian. Penentuan lokasi ini juga mempertimbangkan kemudahan akses dan relevansi konteks sosial-politik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun jadwal penelitian disusun secara terencana mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

##### **3.1.1 Faktor Penurunan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Aceh di Kota Banda Aceh**

###### **1. Representasi Wakil**

Pitkin menyatakan bahwa wakil adalah orang yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kota Banda Aceh, fraksi Partai Aceh masih mendominasi komposisi parlemen. Namun, dibandingkan dengan periode sebelumnya, keterwakilan Partai Aceh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tren penurunan ini terlihat dari semakin berkurangnya jumlah kursi yang diperoleh partai dalam beberapa pemilu terakhir. Meskipun tetap

menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak, penurunan ini mencerminkan perubahan dinamika politik dan preferensi pemilih di daerah tersebut. Berikut adalah daftar anggota DPRD Kota Banda Aceh dari fraksi Partai Aceh beserta daerah pemilihan:

**Tabel 3. Perolehan Kursi Partai Aceh di Parlemen DPRD Kota Banda Aceh periode 2019-2024**

| No | Nama                    | Dapil             |
|----|-------------------------|-------------------|
| 1  | Teuku Hendra Budiansyah | KOTA BANDA ACEH 2 |
| 2  | Bunyamin                | KOTA BANDA ACEH 3 |

Sumber: Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam perolehan kursi Partai Aceh di DPRK Kota Banda Aceh antara pemilu legislatif tahun 2019 - 2024 dan 2024 - 2029. Pada pemilu tahun 2019, Partai Aceh berhasil meraih 2 kursi di DPRK Kota Banda Aceh, menandakan masih adanya basis dukungan politik yang cukup dari masyarakat terhadap partai lokal ini. Namun, pada pemilu legislatif tahun 2025, Partai Aceh tidak memperoleh satu pun kursi di DPRK Kota Banda Aceh. Kekosongan kursi ini mengindikasikan terjadinya penurunan drastis dalam elektabilitas partai tersebut, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti berkurangnya kepercayaan publik, lemahnya konsolidasi internal partai, kurang efektifnya strategi kampanye, atau pergeseran preferensi pemilih ke partai-partai nasional maupun lokal lainnya yang dianggap lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perbandingan ini menunjukkan penurunan representasi sebesar 100% dari tahun 2019 ke 2025. Hilangnya kursi Partai Aceh di DPRK Kota Banda Aceh merupakan indikator penting yang merefleksikan perubahan konstelasi politik lokal serta menjadi bahan evaluasi mendalam bagi partai dalam merumuskan ulang strategi politiknya ke depan.

## 2. Upaya Adaptif Yang Dilakukan Partai Aceh Untuk Meningkatkan Jumlah Suara dan Representasi Di DPRD Kota Banda Aceh Pada Pemilu Yang Akan Datang

Menurut Bennet dalam Putra (2010: 10), strategi adaptif terdiri dari berbagai modifikasi yang dilakukan manusia untuk mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dengan cepat dan menyelesaikan masalah. Dalam partai politik, strategi adaptif mengacu pada kemampuan partai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan politik, sosial, dan faktor lainnya. Strateginya meliputi menanggapi tren baru, kebutuhan pemilih, dan dinamika politik yang terus berubah, serta mengadaptasi platform, pesan, dan teknik komunikasi agar tetap relevan dan efektif.

## 3. Peluang dan Tantangan Partai Aceh

Partai Aceh memiliki potensi besar untuk menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang signifikan dalam menerapkan strategi adaptif di tengah perubahan dinamis dalam politik. Berdasarkan wawancara ada beberapa peluang potensial yang dimiliki Partai Aceh, yang dapat membantu pemulihan citra dan eksistensi Partai Aceh, di antaranya:

- Partai Aceh mudah membangun jaringan karena basis massanya terdiri dari mantan kombatan GAM dan keluarga besar kombatan, yang jumlahnya masih banyak dan kuat.
  - Partai Aceh memiliki sejarah dan latar belakang pendirian yang sangat penting dalam membentuk identitas politik Aceh.
  - Partai Aceh berhasil mengalahkan partai popularitas nasional sebagai partai lokal di Aceh.
- Berikut adalah faktor-faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat terhadap partai dan caleg yang diusung dalam bentuk poin:

- Kepercayaan Masyarakat: Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai dan calon legislatif (caleg) yang diusung dapat menghambat dukungan politik.

- Track Record Caleg: Rekam jejak (track record) caleg selama menjabat, termasuk kontribusi terhadap pembangunan dan sumbangsih mereka kepada masyarakat dan daerah, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon tersebut.

## 3.2 Pembahasan

### 1. Kualitas Wakil

Kualitas seorang anggota dewan sering kali diukur berdasarkan umur, karena umur dianggap berkaitan erat dengan pengalaman hidup. Pengalaman yang diperoleh seiring berjalannya waktu berperan penting dalam mengembangkan kebijaksanaan, pemahaman, serta keterampilan yang memengaruhi kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Dengan bertambahnya usia, seseorang berpeluang untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kualitas pekerjaan, hubungan sosial, dan kehidupan pribadinya. Pertumbuhan emosional dan psikologis yang terjadi seiring bertambahnya usia juga berkontribusi terhadap kestabilan emosional, kematangan pribadi, dan kualitas hubungan interpersonal yang lebih baik. Oleh sebab itu, umur yang lebih tua kerap dianggap sebagai indikator penting dalam menilai kemampuan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab, terutama dalam posisi strategis seperti anggota dewan.

Berdasarkan data yang diperoleh, anggota dewan dari fraksi Partai Aceh di DPRK Kota Banda Aceh mayoritas berusia antara 40 hingga 60 tahun, dengan usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang paling stabil dan matang, baik secara emosional maupun finansial (WEN, 2021). Astrid (2021) juga menyatakan bahwa seseorang di usia 40-an biasanya memiliki kestabilan diri yang lebih baik, merasa lebih pasti mengenai jati diri mereka, serta lebih teguh dalam pandangan dan keputusan hidupnya. Dengan kata lain, pada usia ini, seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan yang membuatnya lebih yakin dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan atau tekanan dari lingkungan luar. Pada pemilu legislatif tahun 2019, Partai Aceh berhasil menempatkan dua wakilnya di DPRK Kota Banda Aceh, yaitu Teuku Hendra Budiansyah yang berusia 46 tahun dan Bunyamin yang berusia sekitar 61 tahun. Rentang usia ini menggambarkan bahwa partai mengandalkan figur dengan latar belakang usia yang matang dan pengalaman yang cukup dalam menjalankan fungsi legislasi serta representasi politik. Namun, pada pemilu legislatif tahun 2024, Partai Aceh tidak memperoleh satu pun kursi di DPRK Kota Banda Aceh. Hal ini menandai pergeseran signifikan dalam peta politik lokal, yang tidak hanya secara kuantitatif kehilangan seluruh kursinya, tetapi juga secara kualitatif kehilangan tokoh-tokoh berpengalaman yang sebelumnya aktif dalam parlemen kota. Kondisi ini menciptakan kekosongan dalam representasi politik lokal yang sebelumnya diisi oleh kader-kader matang dan berpengalaman.

Jika dilihat secara komparatif antara periode 2019-2024 dan 2024-2029, terlihat penurunan drastis dalam keterwakilan Partai Aceh, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pengalaman legislator. Ketidakhadiran tokoh-tokoh tersebut berpotensi mengurangi pengaruh partai dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat kota. Fenomena ini mencerminkan perubahan kepercayaan publik terhadap partai dan menjadi sinyal penting bagi evaluasi internal partai, khususnya terkait regenerasi kader, strategi komunikasi politik, serta adaptasi terhadap dinamika aspirasi pemilih. Selain umur, pendidikan juga merupakan tolok ukur penting dalam menilai kualitas anggota dewan. Tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas individu, di mana pendidikan sering dipandang sebagai indikator kemampuan dan pengetahuan. Pendidikan yang lebih tinggi membuka akses terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas seseorang. Pendidikan formal membekali individu dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan di berbagai bidang. Selain itu, pendidikan juga mengasah kemampuan analitis yang esensial dalam

memahami dan memecahkan masalah kompleks, sehingga berdampak positif pada pengambilan keputusan dan kinerja dalam berbagai situasi. Pendidikan tinggi biasanya berkaitan dengan peluang karier yang lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Pada pemilu 2019, Partai Aceh menempatkan dua wakil berpendidikan Sarjana (S1), yaitu Teuku Hendra Budiansyah dan Bunyamin, yang menunjukkan bahwa partai mengusung kader dengan latar belakang pendidikan tinggi. Namun, meskipun pada pemilu 2024 partai kembali mencalonkan individu dengan tingkat pendidikan setara, tidak satu pun berhasil memperoleh kursi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan tidak lagi menjadi faktor utama keberhasilan politik, melainkan dipengaruhi oleh perubahan preferensi pemilih dan dinamika politik lokal yang kompleks. Dalam hal jumlah periode menjabat, kedua anggota legislatif tersebut tercatat telah menjalani dua periode sebagai anggota dewan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas wakil dari fraksi Partai Aceh pada periode sebelumnya sudah cukup baik, sehingga indikator kualitas wakil tidak dapat dijadikan alasan utama penurunan kursi Partai Aceh pada pemilu 2019-2024. Menurut Labolo (2018), pemilih cenderung lebih mendukung kandidat yang memiliki reputasi yang baik dan menunjukkan tingkat integritas yang tinggi.

## **2. Komitmen Kerja**

Kemenangan sebuah partai dalam pemilu legislatif periode berikutnya sangat dipengaruhi oleh komitmen kerja anggota dewan yang terpilih. Oleh karena itu, menilai tingkat komitmen anggota dewan terhadap rakyat menjadi hal penting dalam evaluasi kinerja mereka sebagai wakil rakyat. Salah satu indikator yang kerap digunakan adalah tingkat kehadiran anggota dewan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna merupakan forum utama bagi anggota dewan untuk membahas isu-isu penting, mengajukan kebijakan, serta mengambil keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh sebab itu, tingkat kehadiran dapat memberikan gambaran seberapa serius dan berkomitmen anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat.

## **3. Dimensi Yang Diwakili**

Konsep teori perwakilan politik menurut Pitkin mencerminkan dimensi di mana pemilik hak suara mengacu pada masyarakat secara keseluruhan serta merepresentasikan kepercayaan rakyat secara umum. Dalam menganalisis penyebab berkurangnya jumlah kursi suatu partai, selain mempertimbangkan faktor calon legislatif yang diajukan, penting juga untuk menilai tingkat kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi.

## **4. Pemahaman Terhadap Konsep Keterwakilan Politik**

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD dari fraksi Partai Aceh di Kota Banda Aceh, pemahaman terhadap konsep keterwakilan politik dapat dilihat dari bagaimana anggota legislatif menyikapi dinamika perolehan kursi dan perubahan peta politik lokal. Misalnya, pada pemilu 2024 terdapat enam partai lokal yang bertarung, dengan Partai Aceh dan PDA sebagai partai lokal pertama yang pernah mendominasi kursi legislatif Aceh, terutama pada pemilu 2009. Namun, tren penurunan kursi partai lokal, termasuk Partai Aceh, semakin nyata pada pemilu 2014 dan 2019, bahkan pada pemilu 2024 Partai Aceh kehilangan seluruh kursinya di Banda Aceh. Dominasi kursi kini lebih banyak dikuasai oleh partai nasional seperti PKB yang sebelumnya tidak pernah memperoleh kursi. Menurut pandangan beberapa informan, penurunan kursi Partai Aceh disebabkan

oleh beberapa faktor, antara lain memudar semangat perjuangan awal, kompetensi kader yang tidak diterima masyarakat, tingginya praktik money politics di Aceh, serta persoalan internal partai terkait penempatan calon legislatif. Kekecewaan publik juga berkaitan dengan kegagalan partai dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur yang belum memadai. Meskipun Aceh menerima dana Otonomi Khusus (Otsus) cukup besar, persoalan-persoalan mendasar masih belum terselesaikan, yang berkontribusi terhadap menurunnya minat masyarakat untuk memilih Partai Aceh.

## **5. Kepercayaan Terhadap Wakil**

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, rendahnya kepercayaan publik terhadap partai dan calon legislatif yang diusung menjadi faktor penghambat utama dalam meraih suara. Rekam jejak atau track record caleg selama menjabat sangat memengaruhi pandangan masyarakat, terutama terkait kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pemenuhan janji politik. Keberhasilan atau kegagalan masa lalu sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat di masa depan. Menurut Putnam (1993), membangun kepercayaan politik membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial serta hubungan saling percaya antaranggota masyarakat. Kepercayaan publik ini pada akhirnya memengaruhi keputusan politik, khususnya hak suara, sehingga kader Partai Aceh yang mendapat dukungan penuh dapat menjadi perwakilan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

## **6. Dimensi Substansi Perwakilan Kepentingan Kelompok Adat**

Kelompok masyarakat adat merupakan bagian integral dari keberagaman budaya dan identitas suatu daerah. Mereka menjaga dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks politik lokal, komunitas adat berperan penting dalam menjaga keberagaman budaya serta memperkuat identitas daerah. Dalam wawancara, disampaikan bahwa terdapat komisi dewan yang diarahkan oleh kebijakan partai untuk memperkuat kebudayaan Aceh, yang berhubungan langsung dengan penguatan identitas daerah. Nilai-nilai dan norma budaya Aceh perlu diangkat kembali agar sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, seperti kemajuan di bidang AI dan IT. Tujuannya adalah memastikan pelestarian tradisi dan kebiasaan Aceh oleh generasi masa kini, sehingga identitas Aceh tetap menjadi kekuatan dalam membentuk kepemimpinan masa depan. Penguatan nilai-nilai budaya ini juga menjadi antitesis terhadap praktik korupsi yang berkembang dalam pemerintahan. Ahmad Ramadhan (2023) menyoroti bahwa keberhasilan penerapan kebijakan sangat bergantung pada adanya pendidikan politik yang memadai serta dukungan dari para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

## **7. Kepentingan Kelompok Anak Muda**

Kelompok pemuda memiliki peran vital dalam konteks politik, sejajar dengan kelompok agama dan adat. Sebagai kelompok pemilih terbesar dalam beberapa periode terakhir, aspirasi dan kepentingan mereka seharusnya menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan politik. Dalam wawancara, anggota dewan fraksi Partai Aceh menegaskan bahwa pemuda adalah generasi penerus yang sangat penting, dengan latar belakang sejarah Partai Aceh yang banyak didirikan oleh generasi muda yang merupakan bagian dari GAM. Partai Aceh telah mengembangkan dua pendekatan untuk membangun generasi muda: pertama, pembentukan kelompok pemuda berbasis budaya yang memberikan ruang kreasi di bidang seni, budaya, dan interaksi sosial; kedua, mendorong kreativitas

pemuda dalam mengembangkan aktivitas ekonomi, terutama sektor jasa, dengan kolaborasi antar daerah. Fokus utama ke depan adalah memberdayakan pemuda dalam ekonomi agar mereka tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, pemuda merupakan komponen penting dalam dinamika politik dan pembangunan Aceh, dan menjadi kekuatan baru yang mampu mendorong perubahan budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, anggota dewan harus memberikan perhatian lebih pada aspirasi dan kepentingan pemuda agar mereka berkembang maksimal dan berkontribusi pada kemajuan Aceh.

## **8. Sistem Partai**

Istilah sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema*, yang merujuk pada keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama. Dalam politik, sistem partai mengacu pada pola hubungan dan dinamika antarpantai dalam suatu wilayah, baik tingkat lokal maupun nasional. Maurice Duverger (1972) menegaskan bahwa sistem partai sangat terkait dengan sistem pemilu yang berlaku, di mana aturan dan mekanisme pemilu menentukan bentuk dan jumlah partai politik yang tumbuh. Keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh strategi eksternal, tetapi juga oleh struktur internal yang mencakup mekanisme pengambilan keputusan, hierarki organisasi, sistem komunikasi, dan prosedur akuntabilitas. Sistem internal yang terbuka dan partisipatif memungkinkan partai menjaring kader berkualitas dan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap partai dan kadernya. Dengan demikian, sistem partai yang solid memberikan keunggulan kompetitif dalam kontestasi politik.

Dalam Partai Aceh, tidak terdapat konsep sistem internal yang eksplisit dalam AD/ART yang terkait langsung dengan penurunan kursi legislatif. Namun, wawancara dengan Sekretaris Jenderal DPW Partai Aceh menyebutkan adanya sikap eksklusif organik di internal partai, di mana sebagian anggota menganggap partai sebagai milik mereka karena latar belakang kombatan. Hal ini menyulitkan individu non-kombatan untuk bergabung dan berperan aktif, yang secara tidak langsung berkontribusi pada penurunan elektabilitas. Sikap eksklusif ini menjadi hambatan dalam membuka diri terhadap masyarakat luas dan memperluas basis dukungan. Pengakuan atas persoalan ini menjadi langkah awal menuju perbaikan. Dengan membuka ruang bagi keberagaman dan inklusivitas, Partai Aceh memiliki peluang untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan tren penurunan elektabilitas. Ini menjadi seruan bagi seluruh elemen partai untuk bersama-sama membangun partai yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan rakyat Aceh.

## **9. Budaya Politik**

Budaya politik merujuk pada pola perilaku, sikap, nilai, dan orientasi politik yang mendasari kehidupan politik masyarakat. Verba (1963) mengidentifikasi tiga tipe budaya politik: parokial, subjek, dan partisipan, yang menunjukkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam politik. Almond dan Verba juga menegaskan bahwa budaya politik memengaruhi stabilitas politik dan efektivitas sistem politik. Di Partai Aceh, budaya politik telah mengalami transformasi (Hadiguna, 2009). Dahulu, hanya pejuang yang bisa menjadi caleg, namun kini telah melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti pengusaha, umara, dan akademisi. Perubahan budaya politik ini berdampak positif, terlihat dari peningkatan kursi pada Pileg 2024 dibandingkan 2019, meskipun belum kembali ke tingkat 2009. Perubahan ini menunjukkan upaya Partai Aceh untuk lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas representasi politik. Relasi yang harmonis antara partai politik lokal maupun antaranggota partai di Aceh Besar perlu dipulihkan dan diperkuat kembali.

Jangan sampai muncul konflik atau persaingan tidak sehat dalam perebutan kursi DPRK yang justru merugikan satu sama lain pada saat pemilihan umum Adetya (2018).

## 10. Sistem Pemilu

Indonesia menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka, di mana alokasi kursi legislatif berdasarkan jumlah penduduk daerah pemilihan. Sistem ini memungkinkan munculnya multipartai karena setiap partai dapat mengajukan lebih dari satu calon. Metode Sainte-Laguë digunakan untuk mengonversi suara menjadi kursi legislatif dengan membagi suara partai menggunakan bilangan ganjil berurutan dan mengurutkan hasil pembagian tersebut. Partai Aceh menganggap bahwa metode pembagian kursi saat ini kurang menguntungkan, bahkan merugikan mereka. Sistem lama dikenal dengan istilah "kursi patah," yang memungkinkan sisa suara partai dikonversi menjadi kursi tambahan, sedangkan sistem Sainte-Laguë tidak memberikan peluang tersebut secara optimal. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh. Sebagai peneliti yang netral, penting untuk menjaga integritas dan keadilan sistem pemilu, agar sistem tersebut mencerminkan nilai demokrasi sejati di mana setiap suara dihormati dan setiap warga negara memiliki hak setara dalam menentukan arah politik. Reformasi pemilu sebaiknya diarahkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tanpa memihak partai tertentu, sehingga pemerintahan yang terbentuk menjadi cerminan kehendak rakyat secara menyeluruh.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penurunan signifikan keterwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Aceh di Kota Banda Aceh pada Pemilu 2024 merupakan hasil dari berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berinteraksi. Dari sisi internal, kualitas kader legislatif yang diajukan menjadi faktor penting meskipun sebagian besar anggota yang terpilih memiliki kualitas baik. Namun, tidak semua calon legislatif memiliki kompetensi yang setara, sehingga hanya sembilan kader terbaik yang berhasil memperoleh kursi. Rendahnya kinerja anggota dewan dan melemahnya kepercayaan publik terhadap Partai Aceh turut memperburuk kondisi ini. Di samping itu, adanya konflik internal, inkonsistensi kebijakan partai, dan ego sektoral dalam tubuh partai menjadi hambatan besar bagi penguatan soliditas organisasi yang seharusnya menjadi fondasi bagi keberhasilan elektoral. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika internal partai yang kurang harmonis berkontribusi signifikan terhadap menurunnya keterwakilan partai di DPRD Kota Banda Aceh.

Dari sisi eksternal, perubahan preferensi pemilih di Kota Banda Aceh juga berperan penting. Penurunan kursi ini mencerminkan adanya pergeseran politik di kalangan pemilih yang sebelumnya menjadi basis kuat Partai Aceh, kini beralih memberikan dukungan kepada partai-partai nasional seperti PKS, PAN, NasDem, dan Demokrat. Komunitas adat menyoroti kurangnya komitmen Partai Aceh terhadap nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat adat, sementara komunitas pemuda menganggap karakter individu anggota partai sebagai faktor penghambat elektabilitas partai. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap representasi politik Partai Aceh sudah mulai menurun, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil pemilu secara signifikan. Penelitian juga menyoroti pentingnya pemahaman dan penerapan konsep keterwakilan politik yang utuh, dimana wakil rakyat harus benar-benar mampu merepresentasikan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dalam konteks ini, Partai Aceh perlu melakukan perbaikan strategi politik melalui pendekatan yang lebih intensif ke akar rumput, memperbaiki kaderisasi, dan menguatkan kampanye yang relevan dengan kebutuhan dan

harapan masyarakat. Pendekatan modern melalui media sosial dan konsolidasi internal yang lebih solid diharapkan dapat membalikkan tren penurunan suara dan kursi yang terjadi pada Pemilu 2024. Dengan demikian, tantangan elektoral yang dihadapi oleh Partai Aceh tidak hanya merupakan refleksi dari dinamika politik lokal tetapi juga mencerminkan kebutuhan partai untuk beradaptasi dan melakukan reformasi internal guna mempertahankan eksistensinya sebagai partai lokal yang berpengaruh di Aceh

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Dalam penelitian ini ditemukan sejumlah temuan menarik yang memberikan gambaran mendalam tentang dinamika politik Partai Aceh di Kota Banda Aceh. Salah satu temuan penting adalah pergeseran politik yang signifikan di kalangan pemilih Banda Aceh, yang sebelumnya menjadi basis kuat Partai Aceh, kini mulai bergeser ke partai-partai nasional seperti PKS, PAN, NasDem, dan Demokrat. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan preferensi masyarakat yang semakin kompleks, di mana faktor-faktor eksternal seperti kompetisi politik yang semakin ketat, perubahan regulasi pemilu, serta meningkatnya kesadaran politik pemilih mempengaruhi hasil elektoral partai lokal tersebut. Penurunan signifikan kursi Partai Aceh dari periode 2019 yang masih memperoleh dua kursi, hingga kehilangan seluruh kursinya pada pemilu 2024, mencerminkan tantangan besar dalam mempertahankan relevansi politik di tengah perubahan sosial dan politik yang cepat. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan adanya ketidakkonsistenan internal dan rendahnya komitmen kerja sebagian kader, yang turut berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Partai Aceh. Keadaan ini diperparah dengan implementasi sistem pemilu Sainte- Laguë yang baru diberlakukan pada 2019, yang cenderung kurang menguntungkan bagi partai lokal tersebut.

Temuan lain yang menarik adalah upaya adaptif yang dilakukan oleh Partai Aceh untuk menghadapi tantangan tersebut. Partai diharapkan mampu mengadopsi strategi yang lebih responsif dan adaptif dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi seperti media sosial dan penggunaan data sebagai basis komunikasi politik. Komunikasi yang terbuka dan relevan dengan kebutuhan generasi muda menjadi kunci penting untuk membangun kembali dukungan politik. Penguatan nilai-nilai budaya dan adat Aceh juga mendapat perhatian khusus, di mana anggota dewan dari fraksi Partai Aceh diarahkan untuk melestarikan serta mengangkat kembali nilai-nilai budaya dan norma adat yang berakar kuat di masyarakat Aceh, namun dengan penyesuaian terhadap perkembangan zaman, termasuk kemajuan di bidang AI dan IT. Hal ini bertujuan tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memperkuat identitas Aceh sebagai kekuatan politik yang berkelanjutan di masa depan. Selain itu, kelompok pemuda juga menjadi fokus perhatian khusus karena mereka merupakan kelompok pemilih terbesar dan generasi penerus kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, aspirasi dan kepentingan pemuda perlu diakomodasi secara serius dalam kebijakan politik dan perencanaan partai.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai dinamika Partai Aceh terhadap fenomena penurunan jumlah kursi dalam komposisi DPRK Kota Banda Aceh dari setiap periode pemilu, dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah kursi Partai Aceh pada pemilu 2019 tidak hanya disebabkan oleh persoalan internal partai, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Meskipun sebagian besar anggota dewan dari Fraksi Partai Aceh memiliki latar belakang pendidikan, usia, dan

pengalaman yang memadai, tidak semua calon legislatif yang diusung memiliki kualitas yang setara sehingga hanya dua kader yang berhasil memperoleh kursi. Rendahnya komitmen kerja sejumlah anggota legislatif serta menurunnya kepercayaan publik berdampak negatif, ditambah pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang kurang optimal sehingga menimbulkan citra buruk di kalangan ulama dan tokoh adat. Ketidakkonsistenan dan sikap egois dalam internal partai serta penerapan sistem pemilu Sainte Lague yang baru diberlakukan pada 2019 juga turut memengaruhi berkurangnya perolehan kursi. Kondisi ini semakin memburuk pada pemilu 2024 di mana Partai Aceh tidak memperoleh satu pun kursi di DPRK Kota Banda Aceh, yang menunjukkan tren penurunan signifikan seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, Partai Aceh perlu mengadopsi pendekatan strategis yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika politik serta meningkatnya kesadaran masyarakat dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur internal, kaderisasi, dan kualitas calon legislatif. Langkah penting adalah membangun kembali kepercayaan publik melalui peningkatan transparansi, konsistensi sikap politik, penguatan fungsi representasi, serta menyesuaikan pesan politik agar relevan dengan kebutuhan masyarakat terutama generasi muda, dengan pendekatan komunikasi yang terbuka dan berbasis data serta penggunaan teknologi dan media sosial secara efektif guna menarik simpati pemilih di masa mendatang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang mengandalkan keterlibatan langsung peneliti sebagai instrumen utama. Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang hanya berfokus pada Kota Banda Aceh, sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas ke wilayah lain. Selain itu, jumlah informan yang terbatas dan teknik purposive serta snowball sampling juga berpotensi mempengaruhi keberagaman dan representativitas data. Keterbatasan lain muncul dari sifat data yang sebagian besar bersifat subjektif dan tergantung pada perspektif informan sehingga bisa saja terjadi bias interpretasi. Peneliti juga terbatas oleh waktu pelaksanaan penelitian yang menuntut pengumpulan data dan analisis yang efisien dalam rentang waktu akademik yang terbatas. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran situasional yang spesifik dan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi secara menyeluruh di luar konteks yang diteliti

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penelitian ke depan disarankan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penurunan keterwakilan Partai Aceh, khususnya dengan memperluas cakupan informan dan teknik pengumpulan data agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam. Selain itu, perlu dilakukan studi longitudinal untuk memantau dinamika perubahan politik dan efektivitas strategi yang diterapkan partai dalam menghadapi pemilu mendatang. Penelitian juga dapat mengeksplorasi peran teknologi digital dan media sosial secara lebih rinci dalam upaya penguatan basis massa serta keterlibatan kelompok pemuda, yang menjadi kunci keberlanjutan politik partai. Lebih lanjut, studi masa depan diharapkan dapat mengintegrasikan aspek budaya lokal Aceh sebagai kekuatan strategis dalam membangun kader politik yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, sehingga Partai Aceh mampu membangun kembali kepercayaan publik dan memperbaiki posisi politiknya secara signifikan pada pemilu berikutnya

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penelitian berlangsung. Bantuan dari para dosen pembimbing, keluarga, serta rekan-rekan sangat berarti dalam kelancaran penulisan karya ilmiah ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Pustaka Pelajar.
- Bakar, A. Y. A. (2020). Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Cv. Rumoh Cetak). Dinas Syariat Islam Aceh.
- Budiardjo, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama
- Duverger, M. (1972). The Study Of Politics. Crowell.
- Hadiguna, R. Ampuh. (2009). Manajemen Pabrik: Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektifitas (Edisi Pertama). Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. (2017). Metode penelitian pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Hafijal. (2020). Analisis Penurunan Perolehan Kursi Partai Aceh Di Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019. Ar- Raniry State Islamic University.  
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/16349/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2017). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.  
<https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>
- Labolo, Muhadam. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal. Universitas Gadjah Mada Press.  
<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=7804>
- Usman Nur, M., & Safwadi, I. (2018). Dinamika Politik Partai Lokal dan Nasional Pada Pemilukada di Aceh, Tahun 2017. Jurnal Humaniora,2.  
<http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/humaniora/article/view/61>
- Pitkin, Hanna Fenichel. (1967). The Concept of Representation. University of California Press.  
<https://www.jstor.org/stable/2214898>
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. Sage Publications.  
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1379117>
- Suseno, N. S. (2013). An empirical analysis of auditor independence and audit fees on audit quality. International Journal of Management and Business Studies.  
[https://www.researchgate.net/publication/328343921\\_An\\_empirical\\_analysis\\_of\\_auditor\\_independence\\_and\\_audit\\_fees\\_on\\_audit\\_quality](https://www.researchgate.net/publication/328343921_An_empirical_analysis_of_auditor_independence_and_audit_fees_on_audit_quality)
- Adetya, Taufiq. (2018). Elektabilitas Partai Politik Lokal Dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pilkada Serentak 2017 di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/2209/>
- Ulfa, D. (2024). Eksistensi Partai Politik Lokal Aceh Di Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif (Studi Terhadap Eksistensi Partai Aceh (Partai Pa) Dalam Pemilu Tahun 2014-2019). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, 9.

<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/28694>

Verba., A. and. (1963). The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton university press.

<https://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2>

